

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perpindahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang sampai saat ini masih berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan (Wulandari, 2009).

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang memiliki akuntabilitas. Menurut (Mardiasmo, 2009), agar dapat mencapai akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah mereka lakukan kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi atas

aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya dan konsisten. Semakin cepat dan akurat informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah, akan memberikan dampak positif bagi instansi. Contohnya seperti Pemerintah Kota Yogyakarta, dimana Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan tersebut lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas saat menggunakan dan menyusun laporan keuangan. Hal ini menjadikan Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mempertahankan penilaian tertinggi atas laporan keuangan daerah pada 2017 dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk delapan kali berturut-turut (<http://id.beritasatu.com>).

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2017. Meskipun memperoleh opini tertinggi, namun sejumlah permasalahan keuangan untuk tahun anggaran 2016 sempat menjadi temuan dari BPK dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Untuk mencegah potensi – potensi buruk terjadi, pihak instansi perlu menyadari bahwa ada ancaman dari berbagai sumber seperti dari lingkungan internal. Contoh dari lingkungan internal itu sendiri seperti kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan.

Prestasi yang diperoleh Pemerintah Kota Yogyakarta berupa pemberian opini WTP delapan kali berturut-turut oleh BPK inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin mengetahui apakah faktor-faktor internal di atas berperan penting dan berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga meraih opini WTP delapan kali berturut-turut. Apabila memang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, pastinya akan dijadikan percontohan bagi daerah lain agar akuntabilitas kinerja instansi menjadi lebih baik.

Faktor-faktor yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya telah diteliti dalam beberapa penelitian antara lain penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) dengan menggunakan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh negatif terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah. Sedangkan untuk sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Jambi.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Anjarwati (2012) dan Yulianti (2014) dengan hasil adanya pengaruh positif dari kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi berpengaruh negatif. Penelitian juga dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015), hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu penelitian dengan topik akuntabilitas kinerja ini dapat diteliti kembali agar mendapatkan hasil yang konsisten.

Penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian Anjarwati (2012) dan penelitian Lumenta, Morasa, dan Mawikere (2016). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel, dimana penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) menggunakan tiga variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Sedangkan pada penelitian yang baru ini akan ditambahkan satu variabel yaitu ketaatan peraturan perundangan yang diambil dari penelitian Lumenta, Morasa, dan Mawikere (2016). Selain penambahan variabel independen, yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah populasi dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemilihan SKPD sebagai populasi pada penelitian ini dikarenakan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan disusun berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi yang dikonsolidasikan. Selain itu penelitian terdahulu yang peneliti replikasi juga memilih SKPD sebagai sampel penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan**

## **Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang penelitian diatas dapat dibentuk suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
4. Apakah ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dengan responden pegawai di bagian keuangan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya pada instansi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

#### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya agar wilayah penelitian lebih meluas dan mendalam pada bidang penelitian ini.

#### **3. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana dalam pembelajaran untuk memperdalam wawasan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

## **Bab II Kajian Pustaka**

Berisi tentang logika teoritik, telaah pustaka, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran teoritis.

## **Bab III Metode Penelitian**

Berisi tentang pemilihan sampel, pengumpulan data, pengukuran variabel, metode analisis data, hipotesa operasional, uji kualitas data, uji analisis data dan pengujian hipotesa.

## **Bab IV Analisis Data**

Berisi tentang karakteristik responden, hasil uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, pembahasan uji hipotesis.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya, keterbatasan, implikasi serta memberikan saran.